BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengungkap suatu perkara pidana diperlukan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan dan pengungkapannya.

1. Untuk mengungkap suatu perkara pidana diperlukan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan dan pengungkapannya. Alat bukti yang sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk memutus suatu perkara. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dinyatakan bahwa jika anak yang menjadi korban, maka dalam proses pemeriksaan harus didampingi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Jika hakim ragu atas keterangan ahli (*in dubio pro reo*) yang dikemukakan oleh ahli, KUHAP memberi ruang bagi hakim sesuai dengan Pasal 180 KUHAP. Untuk menghindari *in dubio pro reo* pada putusan hakim, atas jabatan dan wewenangnya, hakim berhak memanggil ahli yang kedua untuk diminta keterangannya agar tidak ragu lagi atas keterangan ahli dan membantu hakim dalam memutus.
2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di Indonesia Masih memiliki Pekerjaan

Rumah yang harus segera di selesaikan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pekerja Sosial yang dimintakan undang-undang untuk menampingi Anak korban baik itu kejahatan lainnya maupun Kejahatan Seksual masih menjadi perdebatan oleh beberapa praktisi hukum, dikarenakan adanya pendapat bahwa Laporan Pekerja Sosial tidak bisa disamakan dengan Keterangan Ahli, padahal Laporan Pekerja Sosial dapat menggambarkan kondisi terkini dari Anak Korban. Apabila Laporan Pekerja Sosial dapat di ambil sebagai Keterangan Ahli maka akan memudahkan Penegak Hukum untuk menentukan perbuatan pelaku.

B. Saran

1. Seharusnya penerapan hukum bagi pencabulan anak tidak dilihat dari sisi penegakan hukum oleh penegak hukum saja, ini perlu dilakukan lebih dari itu, yakni menjadikan masyarakat dan lingkungan sebagai pemeran utama. Dengan demikian pemerintah melalui kebijakan perlu mengajak masyarakat luas untuk terlibat dalam penerapan hukum pencabulan anak itu sendiri. Ini dapat diwujudkan dengan membentuk sektor-sektor kecil atau organisasi kecil dalam masyarakat yang dapat secara organisatoris berpartisipasi dalam penerapan hukum.
2. Perkara pencabulan anak merupakan perkara yang sangat sangat kompleks, terutama apabila perbuatan tersebut hanya merupakan pencabulan yang tidak memiliki bekas, maka dibutuhkan adanya alat bukti lain yang dapat menguatkan adanya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Laporan pekerja Sosial merupakan salah satu bentuk penggambaran oleh Pekerja Sosial bagaimana kondisi dari anak korban, sehingga dibutuhkan keahlian yang sesuai dan

kompeten dalam pengamatannya dan dibutuhkan juga dasar hukum yang kuat untuk menjelaskan kedudukan Pekerja Sosial apakah Termasuk Ahli atau tidak, selain itu dibutuhkan Penguraian secara sempit untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Ahli sehingga tidak menjadi bias mengenai siapa saja yang menjadi Ahli.